

## PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Sy. Nurul Syobah**

*(Institut Agama Islam Negeri Samarinda / nurulfaruq@ymail.com)*

### **Abstrak:**

Isu disabilitas adalah topik yang selalu hangat untuk dibahas tidak hanya di negara berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini karena kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok minoritas yang pemenuhan hak-hak nya oleh Negara sering kali tidak diperhatikan. Disabilitas adalah konsep yang kurang disadari di tengah masyarakat meskipun disabilitas adalah kondisi yang pasti akan ditemui pada satu titik dalam rentang kehidupan seseorang. Salah satu jalan untuk memenuhi kesejahteraan penyandang disabilitas adalah melalui pemberdayaan yang bersifat holistik di mana kelompok penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai penggerak utama dan bukan sebagai objek pemberdayaan saja. Penelitian ini, oleh sebab itu, bertujuan untuk membahas (1) Sejauh mana keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan bagi mereka, dan (2) Bagaimana program-program pemberdayaan yang tersedia berdampak pada kesejahteraan sosial kelompok penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas di provinsi Kalimantan Timur belum terlibat secara optimal dalam proses pengambilan kebijakan terkait isu yang membahas kesejahteraan mereka. Selain itu, program pemberdayaan yang disediakan pemerintah Kalimantan Timur hingga saat ini masih belum mampu menjamin kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas.

### **Kata Kunci:**

Pemberdayaan Penyandang disabilitas, kebijakan, Kalimantan Timur.

**Abstract:**

*Dissability issue has become a trending topic which is always interesting to be discussed. Not only in the developing country but also in the developed countries as well. It is so because people with dissability belong to a minority group whose right have not been noticed greatly by the government. Dissability is a concept which has not been realized to be exist in the society although it can be seen clearly in someone's life. One way to fullfill the people with dissability's welfare is through a holistic empowerment where they are involved as the main part but not the object. Therefore, this research are aimed at examining (1) how far is the people with dissability's involvement in planning and implementing the empowerment programs, and (2) how are the effect of empowerment programs on the welfare of people with dissability sosial group in East Kalimantan. The research result shows that the people with dissability in Kalimantan have not been involved yet in the issue of their welfare. Besides, the empowerment programs created by the government of East Kalimantan have not guarateed the people with dissability's welfare.*

**Keywords:**

*Empowerment of people with dissability, Policy, East Kalimantan*

**Pendahuluan**

Penyandang disabilitas sebenarnya tidak begitu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Kelompok penyandang disabilitas di tengah masyarakat cenderung mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari oleh karena lingkungan fisik dan sosial yang tidak inklusif. Artinya, lingkungan di mana para penyandang disabilitas berada cenderung tidak mendukung aktualisasi dari potensi yang mereka miliki. Karenanya, masyarakat sering dituduh sebagai penyebab eksternal dari disabilitas yang dialami oleh seseorang. Tuduhan tersebut, meski tidak sepenuhnya beralasan, merupakan salah satu buah dari upaya kelompok penyandang disabilitas dalam menggeser pandangan umum mengenai sebab terjadinya disabilitas, yaitu dari yang berpusat pada individu menuju masyarakat (sosial).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kishor Bhanushali, "Changing Face of Disability Movement: From Charity to Empowerment" paper dipresentasikan pada seminar nasional "Revisiting Social Work in The Field of Health –A Journey From Welfare to Empowerment" pada 20-21 Februari 2007, University of Baroda, India, hlm. 1-7

Seiring dengan meningkatnya kesadaran umum atas pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang tanpa memandang atribut apapun yang melekat pada dirinya, berbagai jenis pelayanan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas kini mulai dilihat sebagai hak dari para penyandang disabilitas yang harus disediakan oleh masyarakat, terutama negara. Pergeseran perspektif dalam mengkaji wacana-wacana terkait disabilitas ditengarai sebagai factor utama yang melahirkan pandangan-pandangan yang demikian. Dampak dari pergeseran pandangan tersebut cukup signifikan, salah satunya adalah menguatnya kesadaran bahwa penyediaan layanan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas tidak cukup dilakukan melalui mekanisme berbasis *charity*.

Hak atas berbagai layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tidak begitu saja didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Perlu waktu yang tidak sedikit bagi kelompok penyandang disabilitas diseluruh dunia sebelum kesadaran tersebut muncul dan menjadi dominan dalam diskursus terkait disabilitas. Pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada para penyandang disabilitas mengandung implikasi yang penting bagi kelangsungan hidup individu-individu dalam kelompok ini, terutama yang berkaitan dengan pembentukan identitas sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Para penyandang disabilitas tidak mesti lagi terus-terusan terjebak dalam suasana duka yang berkepanjangan. Pengakuan atas hak penyandang disabilitas adalah sumberdaya penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan moral dari para penyandang disabilitas sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mereka untuk menjalani kehidupan pribadi dan sosial yang bermakna. Universalitas dari hak bagi penyandang disabilitas ditengarai bersumber dari kesadaran bahwa disabilitas adalah satu kondisi yang pasti atau pernah dialami oleh setiap orang seiring dengan bertambahnya usia, atau karena sebab-sebab lain. Tidak hanya penting sebagai landasan moral, universalitas tersebut juga penting sebagai pijakan untuk membangun lingkungan fisik dan sosial yang inklusif dalam mengakomodir beragamnya kebutuhan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Bagaimanapun juga, para penyandang disabilitas telah lama menjadi objek diskriminasi yang merugikan mereka. Diskriminasi bagi para penyandang disabilitas terjadi hampir pada semua aspek kehidupan, terutama pada bidang pendidikan dan bidang lapangan kerja. Di bidang pendidikan, penyandang disabilitas cenderung terkucilkan karena dianggap kurang memiliki potensi untuk berkembang selayaknya individu-individu lain. Perbedaan anatomi dan fungsi organ terutama sekali menyebabkan para penyandang disabilitas tersisih dari sektor pendidikan. Bentuk-bentuk bangunan serta sikap kelompok dominan

yang tidak bersahabat bagi penyandang disabilitas dapat dianggap sebagai wujud dari kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok ini.

Tentu saja terjadi kesenjangan dalam hal bekal pendidikan yang dienyam oleh para penyandang disabilitas dengan rekan-rekan mereka yang tidak menyandang disabilitas. Pendidikan yang tersedia bagi masyarakat umum, yang cenderung tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, umumnya lebih berkualitas dibandingkan dengan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini terutama berakar pada kepercayaan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang lebih kecil dari yang prevalensi umum.<sup>2</sup>

Nasib lebih mengenaskan dialami oleh penyandang disabilitas yang tidak terjangkau sama sekali oleh layanan-layanan pendidikan. Alih-alih mampu memperluas cakrawala pemikiran serta keterampilan sebagai bekal hidup mandiri di masa mendatang, kondisi ketiadaan akses tersebut memaksa para penyandang disabilitas untuk hidup pada kondisi yang sulit untuk diterima nalar kemanusiaan. Harapan untuk dapat hidup layak sebagaimana orang-orang lain semakin kabur, bahkan lenyap dilindap kenyataan bahwa satu-satunya masa depan yang tersisa bagi mereka adalah hidup dari derma dan belas kasihan orang lain.

Tingkat pendidikan yang rendah serta keterampilan yang tidak memadai, ketika dihadapkan dengan tuntutan dunia usaha yang kian kompetitif dari waktu ke waktu, menyeret para penyandang disabilitas menuju kemiskinan. Penyandang disabilitas cenderung tidak diterima bekerja serta sulit untuk menciptakan usaha-usaha yang produktif. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, problem ini semakin jelas teramati. Selain bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas di negara-negara berkembang dituntut untuk bersaing dengan para pengangguran lain yang tidak menyandang disabilitas. Dalam iklim persaingan yang tidak sepadan tersebut, mudah diduga, para penyandang disabilitas biasanya keluar sebagai pihak yang terpinggirkan.

Mengatasi hal tersebut, kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas haruslah ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Menyamaratakan ukuran-ukuran kesempatan kerja antara kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok tanpa disabilitas beresiko mengekalkan relasi opresif terhadap mereka. Peran negara secara optimal dalam mengenali hambatan-hambatan yang mencegah penyandang disabilitas dari kehidupan sosial dan pribadi yang layak adalah tantangan yang mesti ditanggapi

---

<sup>2</sup> Ken Davis "The Disabled People's Movement: Putting The Power in Empowerment" paper disajikan dalam seminar internasional Shiffeld University pada tahun 1996.

oleh para pelaku pemberdayaan. Pemberdayaan kelompok disabilitas, dengan demikian, haruslah dilakukan sesuai dengan memodifikasi lingkungan sehingga hambatan-hambatan fisik maupun sosial tersebut menjadi minimal. Tantangan selanjutnya adalah melengkapi para penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja yang memadai dan relevan dengan kondisi anatomis dan fungsional mereka.

Agar para penyandang disabilitas dapat menentukan sendiri hal-hal yang mereka anggap baik bagi kehidupan pribadi dan sosial mereka, perlu disediakan pendidikan yang memadai sebagai sarana pengembangan kemampuan berfikir sehingga para penyandang disabilitas mampu menimbang kebutuhan-kebutuhan mereka serta menyusun rencana pemenuhannya secara rasional dan bertanggung jawab. Membantu para penyandang disabilitas menyusun coping strategy secara optimal, karenanya, harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mencederai hak penyandang disabilitas atas self-determination.

Pemberdayaan bagi kelompok penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Tujuan ini pada dasarnya hendak menyelesaikan dua masalah sekaligus, yaitu memecahkan problem ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas, dan meningkatkan derajat keberfungsian sosial dari individu-individu dalam masyarakat secara umum. Ketika para penyandang disabilitas tidak bergantung terhadap pihak lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka kesempatan bagi pihak-pihak lain tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi lain yang lebih produktif menjadi semakin terbuka. Selain itu, sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar, keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas dalam berbagai aktifitas produktif akan secara langsung mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Memberi ruang yang lebih luas bagi kelompok penyandang disabilitas untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, dengan begitu, adalah salah satu gagasan terpenting dalam setiap program pemberdayaan bagi kelompok disabilitas. Hal ini sekaligus menjadi satu dasar untuk menilai kembali berbagai program rehabilitasi yang selama ini dianggap sebagai standar umum dalam menangani masalah sosial terkait disabilitas. Para penyandang disabilitas yang selama ini kurang terdengar suaranya<sup>3</sup> perlu untuk dilibatkan dalam penyusunan program pemberdayaan serta pelaksanaannya. Meskipun pada negara-negara berkembang di mana tingkat pendidikan yang dienyam oleh para penyandang disabilitas masih sangat rendah sehingga menghambat mereka untuk menyadari

---

<sup>3</sup> Juliet C. Rothman, *Social Work Practice Across Disability*, (USA, Pearson Education: 2003), hlm. 1.

kebutuhan sendiri, keterlibatan penyandang disabilitas haruslah tetap diprioritaskan.<sup>4</sup> Karena itulah maka Pengetahuan lokal mengenai penanganan penyandang disabilitas, yang unik dari setiap tempat, perlu untuk dijadikan pijakan dalam mengembangkan model-model pemberdayaan yang relevan.

Pada akhirnya setiap pihak yang terlibat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas harus menyadari bahwa masalah disabilitas telah berusia hampir setua peradaban manusia. Kompleksitas masalah sosial yang terkait disabilitas tidak dapat diurai dengan sebuah cara universal melainkan melalui beragam cara yang memungkinkan. Kajian-kajian mengenai disabilitas yang telah dilakukan pada hampir seluruh penjuru dunia mesti ditempatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun corak pemberdayaan yang sejalan dengan gagasan para penyandang disabilitas mengenai apa yang terbaik bagi diri mereka dalam lingkungan sosial.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang memanfaatkan teknik kualitatif untuk menangani data-data yang berhasil dikumpulkan. Perspektif eksploratif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal yang memadai tentang sebuah fenomena yang terdapat di tengah masyarakat. Pendekatan eksploratif dianggap relevan dengan tujuan tim peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kehidupan para penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan peran lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam merespon kesejahteraan social mereka.

Meskipun bersifat eksploratif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan studi kebijakan untuk melihat lebih jauh tentang peran aktor-aktor Negara dan non-negara dalam merespon isu-isu pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas. Sebagai pendekatan yang sifatnya komplementer, metode evaluasi kebijakan yang juga diterapkan dalam penelitian ini berguna dalam membentuk gambaran makro mengenai situasi terkini dari usaha-usaha

---

<sup>4</sup> Penelitian berskala nasional yang dilakukan Turmusani di Jordan, misalnya, menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas lebih memilih untuk menerima begitu saja apa yang dianggap pemerintah baik untuk mereka. Dalam jangka panjang, menolak untuk melibatkan para penyandang disabilitas –bahkan ketika mereka menginginkannya- akan berujung pada menguatnya budaya ketergantungan dalam kelompok penyandang disabilitas itu sendiri. Karenanya, pelibatan penyandang disabilitas harus dilakukan dengan memberikan penyadaran yang cukup sehingga mereka bergairah untuk memikirkan nasib mereka di kemudian hari. Lihat: Majid Turmusani, *Disabled People And Economic Needs In The Developing World: A Political Perspective From Jordan*, (Hampshire, Ashgate: 2003).

pemberdayaan yang melibatkan kelompok penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur.

### **Paradigma Penyandang Disabilitas**

Dari waktu ke waktu penanganan terhadap penyandang disabilitas mengalami perubahan. Perubahan tersebut berjalan beriringan dengan berubahnya pandangan masyarakat luas terhadap isu-isu disabilitas serta model-model pemberdayaan yang tepat bagi kelompok penyandang disabilitas yang biasanya hidup terpinggirkan. Pada awalnya, penyandang disabilitas di hampir semua belahan dunia nyaris tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengintervensi arah dari berbagai kebijakan terkait dengan layanan sosial bagi mereka. Para penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas *by born*, biasanya biasanya mengenyam pendidikan lebih sedikit dibandingkan dengan rekan-rekan “normal” mereka. Pada gilirannya, para penyandang disabilitas dengan tingkat pendidikan rendah semakin tersisih dari berbagai aktifitas sosial dan ekonomi di tengah masyarakat oleh sebab keterbatasan *skill* dan pengetahuan yang layak jual.

Mengutip Barton, Barnes dan Mercer mencatat bahwa tahun 1992 menandai terjadinya pergeseran paradigma dalam kajian disabilitas pada level internasional. Transisi dan transformasi paradigma disabilitas pada tahun ini adalah salah satu yang paling signifikan.<sup>5</sup> Hal ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan pergeseran peta geopolitik internasional ketika itu. Sebagaimana diyakini para ahli, decade tahun 1990an merupakan masa-masa awal kemenangan blok sekutu dalam perang dingin melawan pihak sosialis, terutama Uni Soviet. Kemenangan tersebut berimplikasi pada menyebarnya paham liberalism secara massive ke berbagai belahan dunia lain dengan lebih mudah. Liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu rupanya mempengaruhi pandangan kelompok penyandang disabilitas mengenai hak-hak mereka atas distribusi sumber daya secara lebih adil dan merata melalui mekanisme-mekanisme yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.

Terjadinya pergeseran paradig dalam memandang isu-isu disabilitas, tidak diragukan lagi, merupakan faktor utama dalam mendorong munculnya berbagai bentuk layanan sosial baru bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Sepanjang sejarah, disabilitas sebagai bagian penting dari personal tragedy telah mulai dianggap sebagai salah satu bagian dari tidak aksesibelnya

---

<sup>5</sup> Collin Barnes dan Geof Mercer, *Disability: Key Concepts*, (London: Polity Press, 2003), hlm. 47

lingkungan sosial (inaccessibility of social environment). Berbagai bentuk modifikasi lingkungan sosial telah banyak dijadikan model penanganan utama dalam meningkatkan level keberfungsian sosial kelompok masyarakat dengan disabilitas. Sebagai contoh, sebut saja terbukanya akses di bidang pendidikan bagi para penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya paling dini dalam membangun kesetaraan jangka panjang.<sup>6</sup> Para penyandang disabilitas tidak lagi ditepikan dari masyarakat arus utama melalui layanan-layanan institusional bermatra rehabilitasi.

Dalam kajian disabilitas, setidaknya terdapat dua pandangan utama yang masih aktif berkonflik hingga saat ini, yaitu model medis dan model sosial. Model medis mengacu pada pandangan bahwa disabilitas adalah kondisi yang menunjukkan ketidaksempurnaan pada seseorang sehingga ia harus diberikan perawatan yang memadai agar dapat berpartisipasi secara normal. Di sisi lain, model sosial menganggap bahwa lingkungan sosial lah yang membuat orang mengalami disabilitas, terutama melalui lingkungan fisik yang tidak mengakomodir keragaman individu (termasuk penyandang disabilitas).

Baik model medis maupun model sosial pada dasarnya tidak dapat digunakan secara sendiri-sendiri. Agar dapat menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan disabilitas secara lebih baik, diperlukan model yang mengakomodir sebanyak mungkin aspek-aspek yang berkaitan dengan disabilitas. Penerapan model medis secara tidak bertanggung jawab akan berujung pada sikap *blaming the victim*, yaitu para penyandang disabilitas itu sendiri. Keberdayaan penyandang disabilitas pun menjadi tercerabut oleh karena anggapan bahwa disabilitas merupakan ‘penyakit’ yang hanya bisa ditangani oleh profesional di bidang medis. Selain itu, model medis kerap dinilai tidak mampu memberikan manfaat bagi perencanaan kebijakan sosial terkait disabilitas. Sebaliknya, penerapan model sosial secara serampangan juga cenderung mengarah pada penghapusan istilah ‘kecacatan’, impairments, serta istilah-istilah lain terkait disabilitas sehingga pengembangan model-model penanganan masalah disabilitas menjadi mengawang-awang dan sulit dilakukan.

Tema menarik yang nampaknya tengah ramai dibincang dalam kajian mengenai masalah terkait disabilitas adalah aksesibilitas. Akses merupakan topik penting untuk menjelaskan berbagai bentuk hambatan dalam mencapai keberfungsian sosial yang ideal bagi para penyandang disabilitas. Jaeger dan Cyntia menjelaskan bahwa akses bagi penyandang disabilitas menempati posisi

---

<sup>6</sup> Paul T. Jaeger dan Cyntia Ann Bowman, *Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity and Civil Rights*, (New York: Praeger, 2005), hlm. 3



terpenting dalam perencanaan program-program pemberdayaan kelompok ini. Lebih jauh, dua ahli ini menjelaskan bahwa akses “...is a multifaceted concept with impacts on every part of daily life. For individuals with disabilities, access can best be understood as the right to participate equally in ways that are not constrained by physical or mental limitations”<sup>7</sup> Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat disebutkan bahwa pada dasarnya perjuangan penyandang disabilitas sepanjang sejarah umat manusia adalah perjuangan untuk mendapatkan akses yang memadai bagi keberfungsian sosial yang optimal bagi mereka.

Sejalan dengan Jaeger dan Cyntia, Barness dan Mercer juga menyebut bahwa disabilitas pada dasarnya dikonstruksi oleh lingkungan sosial sehingga penjelasan yang komprehensif mengenai disabilitas hanya akan didapatkan jika seseorang mengkaji lingkungan sosial alih-alih individu penyandang disabilitas. Berdasarkan keyakinan tersebut, ahli-ahli ini menyarankan agar kajian-kajian terhadap topik-topik disabilitas baiknya dimulai dengan mengidentifikasi prioritas kelompok penyandang disabilitas atas layanan-layanan sosial yang berguna bagi mereka. Lebih jauh, Barness dan Mercer menyebutkan bahwa cara ideal dalam mengkaji disabilitas memiliki beberapa cirri khas, antara lain: tidak berideologi medis, tidak mesti netral atau mengesampingkan dampak dari opresi yang dialami oleh penyandang disabilitas, tidak mereproduksi pengetahuan yang familiar, serta tidak segan untuk menjelajahi area-area metodologis dan teoritis yang belum terpetakan oleh kajian-kajian sebelumnya.<sup>8</sup>

Pada tataran internasional, penanganan masalah terkait disabilitas memang telah lama menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan di berbagai konferensi internasional. Berbagai gerakan anti-diskriminasi yang diperjuangkan oleh berbagai lembaga kemanusiaan yang merasa bahwa kajian disabilitas selama ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan non-penyandang disabilitas. Riset-riset mengenai disabilitas cenderung mengekalkan diskriminasi atas kelompok tersebut alih-alih membebaskan mereka dari belenggu ketertindasan. Berbagai lembaga pemangku kepentingan penyandang disabilitas di seluruh dunia kerap menuduh bahwa penelitian tentang disabilitas yang selama ini dilakukan pada pusat-pusat pengembangan keilmuan (Universitas dll) umumnya memantapkan relasi yang merugikan kepentingan penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Paul T. Jaeger dan Cyntia Ann Bowman, *Understanding Disability: Inclusion...*, hlm. 63

<sup>8</sup> Collin Barness dan Geof Mercer, *Disability...*, hlm. 102

<sup>9</sup> Michelle Moore, Sarah Deazley dan June Maezler, *Researching Disability Issues* (Philadelphia: Open University Press, 1989), hlm. 100

Jika dilacak lebih jauh, model-model penanganan kelompok disabilitas pada dasarnya hampir setara usia peradaban manusia. Sejarah modern terkait penanganan kelompok disabilitas berskala nasional yang paling terkenal umumnya sering dikaitkan dengan the Elizabethan poor law pada awal abad ke-17. Di masa itu, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok masyarakat tidak beruntung yang pantas untuk menerima santunan dari negara. Undang-undang tersebut juga ditengarai sebagai cikal bakal dari lahirnya model institusional dalam praktek pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut, penyandang disabilitas disejajarkan dengan penderita penyakit kronis yang kehilangan kemampuan untuk berkontribusi bagi masyarakat umum.

Lekatnya kondisi kesehatan dengan disabilitas, sebagaimana ditunjukkan oleh dua perspektif dominan dalam kajian ini, mengukuhkan asumsi bahwa disabilitas memang tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan. Badan kesehatan dunia seperti World Health Organization (WHO) misalnya, mengungkapkan bahwa pengembangan model-model yang ideal untuk mengatasi masalah-masalah terkait disabilitas harus terintegrasi dengan model-model pelayanan kesehatan yang bersifat universal.

Pada tahun 1980-an, WHO mengembangkan instrumen yang dikenal sebagai ICD-10 (international statistical classification of disease and related health problem) untuk mengidentifikasi penyakit melalui diagnosis kesehatan. Fokus utama dari ICD-10 adalah untuk mengetahui prevalensi dari penyakit yang menyebabkan kematian. Dari sudut pandang ICD-10, disabilitas terkategori sebagai sebuah bentuk kelainan yang disebabkan oleh factor-faktor tertentu yang digolongkan sebagai penyakit.

Beberapa decade kemudian, WHO memperkenalkan instrument baru untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai level kesehatan dan disabilitas, yaitu the international classification of functioning, disability and health atau yang lebih dikenal sebagai ICF. Dalam konsep ICF, disabilitas dipandang sebagai sebuah fenomena universal yang umum dihadapi oleh masyarakat, terlepas dari perbedaan bahasa, budaya dan agama. Pandangan atas disabilitas mengalami pergeseran penting, yaitu dari focus pada impairment yang dimiliki oleh seseorang menuju focus pada level kesehatan yang menjadikan seseorang mengalami berbagai bentuk hambatan dalam aktifitas sehari-hari dan partisipasi yang optimal.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Pengenalan konsep ICF sebagai instrumen handal dalam mengidentifikasi berbagai bentuk disabilitas yang dialami oleh individu mulai dilakukan oleh WHO menjelang akhir decade 1990-

Melalui ICF, kecacatan dan kesehatan dilihat dengan cara yang baru dan berbeda dengan pandangan-pandangan sebelumnya. Disabilitas, oleh sebab itu, tidak lagi menjadi eksklusif dan permanen melainkan dinamis dan temporer. Setiap orang dapat saja mengalami disabilitas di satu waktu dan tempat lalu kemudian tidak mengalaminya di lain waktu dan tempat. Disabilitas menjadi perpaduan antara berbagai factor yang berkenaan dengan menjalankan fungsi sosial sehari-hari dan partisipasi yang optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

Menerjemahkan teori-teori pemberdayaan menjadi konsep-konsep yang operasional dan dapat diimplementasikan, barangkali, merupakan element terpenting dari pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Teori-teori pemberdayaan masyarakat akan berguna dalam praktiknya, ketika terdapat model yang tepat untuk menggambarkan hubungan-hubungan antara berbagai elemen yang bekerja dalam masyarakat/komunitas yang hendak diberdayakan. Tanpa model yang jelas, program-program pemberdayaan pada dasarnya akan kehilangan arah segera setelah diluncurkan. Sebagai kajian yang berorientasi pada tindakan nyata, konsep-konsep pemberdayaan masyarakat haruslah bersifat membumi (*grounded to earth*). Ide dan gagasan yang sifatnya mengawang-awang dan cenderung tidak berkaitan dengan kondisi *riil* yang terjadi di tengah masyarakat sejatinya tidak sesuai dengan tujuan utama dari hampir semua program pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Generalisasi secara serampangan, dengan demikian, haruslah dihindari sejak dini. Jika tidak, resiko tergelincir dalam paradox pemberdayaan yang berparadigma top-down akan menjadi semakin besar. Menjawab tantangan tersebut, para pelaku pemberdayaan masyarakat di seluruh dunia umumnya semakin menyadari bahwa dalam setiap program pemberdayaan, masyarakat harus ditempatkan sebagai elemen utama. Perumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat, karenanya, harus diupayakan agar sebisa mungkin dapat mengakomodir pengetahuan-pengetahuan lokal yang membudaya di tengah masyarakat, termasuk penggunaan-penggunaan teknologi tertentu.

---

an. Dalam konsep ICF, WHO membedakan antara performa dan kapasitas dari penyandang disabilitas. Berdasarkan ICF, performa merupakan derajat kesanggupan seseorang dalam menjalankan aktifitas dan fungsi sosial sehari-hari dengan bantuan alat-alat bantu yang biasa mereka gunakan sedangkan kapasitas disebut sebagai tingkat kesanggupan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari tanpa bantuan alat-alat apapun. Lihat "Toward a Common Language For Functioning, Disability and Health", WHO, Geneva: 2002.

Bagaimanapun juga, pengetahuan lokal merefleksikan cara-cara menyesuaikan diri yang digunakan oleh orang-orang dalam lingkungan mereka. Pada dasarnya istilah pemberdayaan penyandang disabilitas mengacu pada pemberdayaan kelompok disabilitas sebagai kelompok sosial yang memiliki potensi sebagaimana manusia lain pada umumnya. Pemberdayaan penyandang disabilitas dibangun di atas keyakinan bahwa dengan beberapa bentuk penyesuaian lingkungan, potensi-potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tentu saja bisa diaktualisasikan dengan optimal. Jika ditilik dari sudut pandang pemberdayaan, intervensi sosial bagi para penyandang disabilitas berhubungan erat dengan jenis dan tingkat disabilitas yang dialami mereka. Hal ini juga tampak dalam adagium tentang disabilitas yang terkenal, yaitu *nothing about us without us*. Memberdayakan penyandang disabilitas seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan anatomis, mental dan sosial yang secara bersama-sama menghambat pemenuhan keberfungsian sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan berbagai bentuk dan model intervensi sosial sangat bergantung pada lingkungan di mana intervensi-intervensi tersebut akan digunakan. Dalam konteks Indonesia, model-model intervensi sosial –salah satunya program pemberdayaan– harus mempertimbangkan tingkat kedewasaan masyarakat (*social maturation*).<sup>11</sup> Mengimpor model-model pemberdayaan secara semena-mena tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Demikian halnya dengan pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Sebisa mungkin penyandang disabilitas di Indonesia dilibatkan dalam perencanaan dan penerapan program-program pemberdayaan demi keberhasilan pelaksanaan program serta peningkatan tingkat pemenuhan kesejahteraan sosial bagi mereka. Di Indonesia, layanan sosial bagi penyandang disabilitas dapat dilihat pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menghilangkan hambatan-hambatan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sejak tahun 2008 pemerintah

---

<sup>11</sup> Dalam praktek pekerjaan sosial, beberapa decade belakangan ini ditandai dengan kemunculan isu-isu indijenisasi praktek pekerjaan sosial. Dalam konteks Indonesia hal ini dapat diartikan sebagai munculnya kesadaran bahwa praktek-praktek pekerjaan sosial sebenarnya telah lama dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia, namun pengetahuan yang sistematis mengenai hal tersebut masih belum terdokumentasi dengan baik sehingga muncul kekuatiran akan penggunaan model-model barat secara berlebihan dalam praktek pekerjaan sosial di era modern sekarang ini. Telaah secara seksama akan menunjukkan bahwa model-model barat tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat Indonesia, salah satunya karena tingkat kedewasaan masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang dihadapi sebagai agregat dari beban interaksi dalam hubungan sosial. lihat Riant Nograho, *Social Policy for Developing Counties*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012).

Indonesia mulai menggunakan konsep ICF dalam mengidentifikasi kecacatan yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Meskipun survey nasional baru dilakukan pada sembilan provinsi, di masa-masa mendatang pemerintah RI diharapkan untuk melakukan survey serupa secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Survey nasional yang dilakukan departemen sosial RI pada tahun 2008 diklaim menggunakan konsep ICF. Meski demikian, hasil survey tersebut tampaknya perlu untuk dikritisi mengingat beberapa kelemahan yang tampak dalam beberapa bagian dari klasifikasi dalam survey tersebut. Survey tersebut, misalnya, mengelompokkan penyandang disabilitas berusia 18-60 tahun dalam satu klaster. Penggabungan tersebut seperti memang tidak tampak bermasalah, namun jika dicermati lebih jauh, menggabungkan penyandang disabilitas dalam rentang usia yang begitu beragam tersebut cenderung mengaburkan esensi dari masalah terkait disabilitas yang mereka hadapi. Seorang penyandang disabilitas berusia 59 tahun, misalnya, cenderung memiliki masalah-masalah keberfungsian yang sama dengan non penyandang disabilitas dengan usia yang sama. Factor usia dengan sendirinya menyebabkan seseorang mengalami berbagai bentuk disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, menggabungkan rentang usia yang begitu beragam tersebut juga menjadikan ukuran produktifitas penyandang disabilitas menjadi sulit diukur sehingga pada akhirnya rekomendasi kebijakapun menjadi sulit untuk diajukan. Dari Sembilan provinsi yang disurvei, Departemen Sosial mencatat bahwa terdapat 299.203 orang penyandang disabilitas. Dari jumlah total tersebut, penyandang cacat fisik menempati urutan terbesar dengan jumlah mencapai 277.201 orang, diikuti penyandang cacat mental dan cacat gabungan (mental dan fisik) dengan jumlah berturut-turut 61.550 orang dan 10.452 orang. Depsos juga mencatat sejumlah 53.128 orang penyandang disabilitas dengan usia di atas 61 tahun.<sup>12</sup> Sebaran jumlah penyandang disabilitas seperti itu sebenarnya perlu untuk dicurigai, apalagi jika mengingat bahwa inklusifitas lingkungan fisik dan sosial di Indonesia yang belum menunjukkan gelagat yang menggembirakan. Disabilitas mempengaruhi pengembangan identitas orang-orang yang menyandanginya. Identitas dikembangkan melalui interaksi berkelanjutan antara seseorang dengan lingkungan sosial di mana mereka berada. Identitas penyandang disabilitas berkembang sesuai dengan inklusifitas lingkungan sosial dalam mengakomodir pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam lingkungan yang inklusif, penyandang disabilitas cenderung mengembangkan konsep diri serta strategi

---

<sup>12</sup> Hasil Survey Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Departemen Sosial RI, 2008.

coping yang positif, hal berkebalikan terjadi dalam lingkungan yang sebaliknya. Penyandang disabilitas pada umumnya mengembangkan cara-cara tersendiri yang unik dalam kaitannya dengan cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial. Keberhasilan program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, lebih dari peran factor eksternal penyandang disabilitas, ditentukan oleh mekanisme coping yang dikembangkan oleh kelompok tersebut. Barness dan Mercer menyebut mekanisme coping penyandang disabilitas mencakup "... *the strategies people adopt in terms of preferred choices and the social, financial and emotional resources available*".<sup>13</sup> Mendampingi penyandang disabilitas membentuk mekanisme coping yang canggih, dengan demikian, adalah bagian penting dari upaya menyukseskan berbagai program-program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas.

### **Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur**

Kelompok penyandang disabilitas umumnya terdiri dari orang-orang miskin yang tersisih dari aktifitas perekonomian mainstream di tengah masyarakat. Kemiskinan yang diderita oleh para penyandang disabilitas bersifat multidimensional. Meski begitu, kemiskinan financial adalah salah satu topik paling penting yang perlu untuk dicarikan solusinya. Penyandang disabilitas cenderung terperangkap dalam jerat kemiskinan oleh karena keterbatasan lingkungan sosial dalam hal kemampuan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan yang menjerat penyandang disabilitas memiliki persistensi ganda. Kebijakan-kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan yang mendera penyandang disabilitas kerap kali *overlapping* dengan kebijakan-kebijakan anti-kemiskinan secara umum. Tidak dapat dipungkiri bahwa beragamnya bentuk dan jenis disabilitas merupakan masalah paling pelik yang kerap menghambat perumusan kebijakan-kebijakan sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Meski begitu, para pemangku kepentingan penyandang disabilitas perlu untuk berkaca dari berbagai konsep-konsep pemberdayaan yang relative universal sehingga memungkinkan untuk diadopsi dalam kerangka pemberdayaan para penyandang disabilitas. Deepa Narayan, misalnya, mengidentifikasi empat elemen yang penting untuk diperhatikan guna menyukseskan program pemberdayaan masyarakat secara umum. Empat elemen tersebut berturut-turut adalah: akses atas informasi,

---

<sup>13</sup> Collin Barness dan Geof Mercer, *Disability...*, hlm. 75

inklusi/partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal.<sup>14</sup> Jika diterapkan pada penyandang disabilitas, dua elemen pertama yang disebutkan Deepa tampaknya akan sesuai. Penyandang disabilitas perlu untuk dibekali dengan kemampuan mengakses informasi dengan cara-cara yang relevan dengan tingkat dan jenis dari disabilitas yang mereka alami.

Di Indonesia, pengakuan atas hak-hak penyandang disabilitas telah diatur, salah satunya, dalam UU No. 4 Tahun 1997. Pasal 5 UU tersebut, misalnya, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Melalui pengakuan tersebut, setiap orang sebenarnya berhak mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberdayakan para penyandang disabilitas melalui program-program intervensi yang relevan. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat kerangka acuan yang jelas dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia. Selanjutnya UU No. 8 tahun 2016 secara lebih gamblang mengkhususkan pembahasan tentang penyandang disabilitas. Beberapa kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut adalah kesamaan hak, perlindungan, penghormatan, pemberdayaan, aksesibilitas, unit layanan disabilitas, komisi nasional disabilitas dan lain sebagainya. Undang-undang ini muncul dengan harapan terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Beberapa hak yang harusnya dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Di Kalimantan Timur, Dinas Sosial sebagai representasi dari pemerintah dalam menghadapi isu disabilitas menyediakan program rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas.<sup>15</sup> “... *Ya kalau kami di Dinsos ini hanya menyediakan program rehabilitasi saja bagi mereka. Jadi mereka kami kursuskan di Jawa, di Bogor dan Solo.*” Bagi pemerintah program ini dipandang berjalan efektif karena mampu memberikan kemampuan (*skill*) bagi para penyandang disabilitas.<sup>16</sup> Meski demikian, muncul berbagai kritik atas program tersebut. Beberapa pihak memandang bahwa program yang hanya berfokus pada penyandang disabilitas dan kemudian berpotensi menebalkan dinding eksklusifitas di sekitar mereka dan tidak membentuk lingkungan yang inklusif. Selain itu, setelah berakhirnya program, Dinas Sosial tidak membuka peluang atau menyalurkan bakat para penyandang disabilitas tersebut ke lembaga

---

<sup>14</sup> Deepa Narayan, *Empowerment and Poverty reduction: A Source Book*, (Washington, The World Bank: 2002), hlm. xx-xxi.

<sup>15</sup> Wawancara dengan kepala bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, 25 April 2018

<sup>16</sup> Wawancara dengan AJ, penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, 29 April 2018

penyedia kerja sehingga pada akhirnya mereka kembali harus berusaha mandiri dengan kemampuan mereka.<sup>17</sup> Berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh pemerintah Kalimantan Timur bagi para penyandang disabilitas juga cenderung tidak sesuai dengan problem utama yang mereka hadapi, yaitu diskriminasi. Alih-alih menggempur habis perlakuan diskriminatif terhadap mereka, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sebagai solusi bagi masalah disabilitas cenderung bertema institusionalisasi, yang terang-terangan bersifat diskriminatif. Para penyandang disabilitas menjadi merasa semakin terkucil sejalan dengan gencarnya pengasingan-pengasingan yang mereka jalani di lembaga-lembaga pendidikan khusus yang disediakan bagi mereka. Hal ini dirasakan oleh salah satu narasumber dalam penelitian ini “...ya kalau kami tidak didorong untuk gabung dengan non disabilitas gimana kami bisa bersaing di kehidupan nyata...”<sup>18</sup> Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu bagian terpenting dari keseluruhan rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini terutama karena pemberdayaan ekonomi sendiri adalah salah satu isu penting dalam kajian mengenai disabilitas. Dalam hal partisipasi dalam aktifitas ekonomi, penyandang disabilitas kerap mengalami hambatan yang menjadikan mereka terkucil dari arus utama perekonomian dan cenderung hanya terlibat dalam aktifitas-aktifitas pseudo-ekonomi. Diskriminasi tersebut terutama disebabkan oleh pandangan umum bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki cukup kecakapan dalam melakukan aktifitas-aktifitas produksi. Persepsi mengenai penyandang disabilitas sebagai kelompok yang ‘tidak berguna’ oleh sebab kurang inklusifnya infrastruktur perekonomian pantas untuk dicurigai sebagai factor terpenting dalam proses diskriminasi penyandang disabilitas. Menjalani kehidupan dalam dunia yang tidak memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dan penuh dapat dilihat melalui prevalensi kelompok penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas umumnya hidup dalam kubangan kemiskinan dan kesulitan ekonomi.<sup>19</sup> Aksesibilitas lingkungan fisik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu penyebab utama terkucilnya para penyandang disabilitas dari berbagai aktifitas ekonomi. Meski demikian, stereotype dan prasangka masyarakat atas penyandang disabilitas juga tidak kalah berperan. Lingkungan kerja yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas pada gilirannya akan menghilangkan kesempatan para penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan aktualisasi diri dari penyandang disabilitas.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan AJ, penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, 1 Mei 2018

<sup>18</sup> Wawancara dengan FT, penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, 16 Mei 2018.

<sup>19</sup> Collin Barnes dan Geof Mercer, *Disability...*, hlm. 9



Lingkungan sosial dan pendidikan yang tidak aksesibel menambah keruh proses pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, Kota Samarinda hanya memiliki satu sekolah inklusi pada tingkatan Sekolah Menengah Atas dan beberapa Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama.<sup>20</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa hingga saat ini inklusifitas belum dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk disediakan oleh pemerintah di Kalimantan Timur. Selain itu, beberapa anak penyandang disabilitas yang bersekolah di Sekolah Inklusi masih kerap menerima tindakan diskriminasi oleh teman ataupun guru. Hal ini ditengarai karena kurangnya pemahaman tentang isu inklusifitas di dunia pendidikan.<sup>21</sup> Penyandang disabilitas di Indonesia umumnya tekucil dari berbagai layanan sosial yang ditujukan bagi mereka. Selama ini layanan sosial bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih bercorak institusional sehingga cakupan dari pelayanan-pelayanan tersebut menjadi terbatas pada lingkungan-lingkungan perkotaan. Penyandang disabilitas, terutama mereka yang berada di daerah-daerah pedesaan umumnya tidak familiar dengan berbagai bentuk layanan sosial yang pada dasarnya tersedia. Selain memiliki kecenderungan untuk menjadi elitis, model-model institusional tersebut juga relative mahal untuk ukuran negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai gantinya, model-model pemberdayaan berbasis komunitas telah mulai dikembangkan guna mengatasi berbagai hambatan tersebut. Keresahan ini diungkapkan oleh salah satu narasumber "...masih banyak penyandang disabilitas di daerah yang berjuang sendiri dibantu oleh komunitas..."<sup>22</sup> Agar berdaya, penyandang disabilitas perlu mengenyam pendidikan yang layak. Sarana dan prasarana penunjang aktifitas pembelajaran tentunya harus didesain se-inklusif mungkin. Gambaran mengkuatirkan mengenai tingkat pendidikan kelompok penyandang disabilitas dapat dilihat dari prevalensi tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang diekspose dalam laporan Depsos tahun 2008 yang menunjukkan bahwa 195.637 jiwa dari total 299.203 jiwa penyandang disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Berdasarkan sumber data yang sama, gambaran yang sama mengkuatirkannya menunjukkan bahwa 229.838 dari 299.203 penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas pada akhirnya menyebabkan mereka tidak

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan pengawas Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, 20 April 2018

<sup>21</sup> Wawancara dengan salah satu orang tua siswa disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi Kota Samarinda, 25 April 2018

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Kaltim, 7 Mei 2018.

memiliki skill yang marketable untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan (menganggur) tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka secara mandiri sehingga membebani keluarga mereka. Dengan demikian, seiring waktu, beban sosial masyarakat secara umum menjadi bertambah sejalan dengan bertambahnya jenis dan ragam kebutuhan dari penyandang disabilitas. Hingga saat ini, pola perekrutan untuk menjaring para penyandang disabilitas yang akan mengikuti program rehabilitasi (pelatihan dan pendidikan) di Kalimantan Timur masih belum sistematis karena masih belum memiliki indikator baku dalam asesmen. Beberapa penanggung jawab di Dinas Sosial Provinsi Kal-Tim masih mengalihkan proses rekrutmen tersebut ke beberapa panti di daerah dan belum ada bentuk asesmen khusus yang mereka sediakan guna menjaring potensi para penyandang disabilitas. Selain itu, jumlah yang ditargetkan untuk menerima program tersebut pun masih sangat minim.<sup>23</sup> Alih-alih hanya mengandalkan provisi dari negara, pelaku pemberdayaan bagi penyandang disabilitas juga diharapkan untuk meningkatkan harga diri para penyandang disabilitas dengan mempromosikan *self-sustainability* bagi penyandang disabilitas. Para pemangku kebijakan diharapkan untuk dapat menciptakan iklim lapangan kerja yang kondusif bagi penyerapan tenaga kerja dari kelompok disabilitas tanpa mengabaikan kualitas produksi. Artinya, kondisi disabilitas yang tidak berhubungan dengan kualitas kerja harus disosialisasikan sehingga setiap orang merasa yakin dengan hasil kerja dari para penyandang disabilitas yang memang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.

### **Peran Disabilitas dalam Penyusunan Kebijakan di Kalimantan Timur**

Penyandang disabilitas telah lama menjadi korban dari lingkungan sosial dimana mereka berada. Selain mengalami sederet bentuk diskriminasi, para penyandang disabilitas juga mengalami berbagai bentuk opresi yang saling mengekalkan satu sama lain. Pekerja sosial kemasyarakatan, karenanya, dituntut untuk dapat memutus mata rantai yang selama ini menghambat para penyandang disabilitas dari kehidupan pribadi dan sosial yang layak. Pekerja sosial yang bekerja dengan kelompok penyandang disabilitas juga perlu menyadari bahwa disabilitas bersifat beragam sehingga tidak sejalan dengan kepercayaan bahwa terdapat satu model tunggal yang paling tepat untuk menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan disabilitas. Meski demikian,

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan PT, penerima program rehabilitasi penyandang disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, 15 Mei 2018.

pekerja sosial juga sebaiknya mengetahui prevalensi umum mengenai bentuk, tingkat dan jenis disabilitas yang dialami oleh orang-orang dengan siapa mereka bekerja. Melalui cara yang demikian, pekerja sosial akan memiliki gambaran mengenai strategi yang relevan dalam rangka memberdayakan mereka. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering mendapatkan diskriminasi dari lingkungan sosialnya. Diskriminasi yang menimpa penyandang disabilitas tidak hanya berupa diskriminasi secara fisik saja tetapi juga secara psikologis. Banyak dari mereka yang kerap kali merasa di nomor duakan dalam lingkungan kerja, sehingga para penyandang disabilitas di Kalimantan Timur khususnya merasa sulit untuk bergabung sebagai pemegang kebijakan. Seorang penyandang disabilitas yang bekerja di kantor pemerintah di Kota Samarinda menceritakan bagaimana pandangan rekan kerja dan atasannya tentang disabilitas membuatnya tepinggirkan dari proses pengembangan diri yang optimal. "...[S]elama saya bekerja di pemerintahan, saya sama sekali tidak pernah diajak untuk diklat. Meskipun saya pernah tau nama saya dimasukkan sebagai nama calon peserta diklat, tapi pasti kemudian akan dihapus karena saya pakai kursi roda." Cerita informan kami tersebut.<sup>24</sup> Dua factor utama yang menentukan tingkat keberdayaan penyandang disabilitas adalah pendidikan dan penyerapan dunia kerja atas mereka. Dengan mengenyam pendidikan yang baik, penyandang disabilitas memiliki kemungkinan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri melalui keterlibatan dalam aktifitas produksi dunia kerja. Modifikasi sarana dan prasarana pendidikan serta penciptaan lingkungan kerja yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas, dengan demikian, adalah syarat utama untuk keberhasilan program-program pemberdayaan bagi kelompok penyandang disabilitas. Untuk lingkup wilayah Kalimantan Timur, kebijakan pemerintah terhadap isu disabilitas masihlah kurang. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan daerah yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah daerah di Kalimantan Timur terkait isu disabilitas. Meski demikian, beberapa informan menjelaskan bahwa rancangan terkait peraturan daerah tentang disabilitas telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dan sudah mencapai tahap sidang paripurna. Akan tetapi, hingga saat ini perda tersebut masih belum dikeluarkan secara resmi karena berbagai kendala yang bersifat administratif.<sup>25</sup> Di sisi lain, para informan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah penyandang

---

<sup>24</sup> Informasi narasumber dalam Focus Group Discussion pegiat studi disabilitas, 11 Mei 2018.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Timur, 12 April 2018.

disabilitas yang bekerja pada sektor pemerintahan masih sangat minim. Minimnya jumlah penyandang disabilitas diperberat dengan stigma sebagian besar stake holder yang menganggap mereka tidak mampu. Pada level ini diskriminasi sering mereka terima sehingga sangat sedikit dari penyandang disabilitas yang dapat berperan sebagai pemangku kebijakan. "...hingga saat ini orang-orang yang konsern terhadap isu disabilitas tidak menempati posisi sebagai pemangku kebijakan..." Ketidak ikut sertaan penyandang disabilitas di Kalimantan Timur menimbulkan polemik dalam berbagai program yang diterapkan oleh pemerintah, alih-alih mempermudah akses bagi para penyandang disabilitas. Salah satu narasumber menceritakan bahwa di beberapa ruas jalan di Kota Samarinda telah dibangun *guiding block* bagi penyandang tuna netra. Akan tetapi, *guiding block* yang telah terpasang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga tidak dapat dipergunakan oleh para penyandang tuna netra. Pengambilan kebijakan yang salah tersebut bukanlah hal yang menggembirakan bagi para penyandang disabilitas.



(kesalahan pemasangan *guiding block* di salah satu ruas jalan Kota samarinda)

Pada leverl nasional, pemerinta Indonesia telah didorong oleh berbagai pihak terutama oleh Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) untuk membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). Komite ini merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang tentang penyandang Disabilitas di Indonesia.<sup>26</sup> Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KND memiliki fungsi untuk memastikan terimplementasinya penghormatan, perlindungan, dan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2016

pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut ketentuan dalam pasal 149 UU Disabilitas, KND harus terbentuk 3 tahun setelah UU disahkan. Meski telah diadakan pembahasn tentang peraturan presiden terkait isu tersebut pada tahun 2016, usaha pembentukan KND masih diperjuangkan oleh berbagai pihak.

### **Penutup**

Perjuangan penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh hak yang setara sebagaimana yang sudah dianggap taken for granted oleh rekan-rekan mereka yang tidak menyandang disabilitas tampaknya masih cukup panjang. Pemenuhan atas sejumlah hak paling mendasar seperti pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah Kalimantan Timur yang memang tengah bergelut dengan sederet hal lain yang memerlukan penanganan yang sifatnya segera.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan sosial mereka, dalam konteks Kalimantan Timur, telah dilakukan oleh sejumlah organisasi sosial dan kemasyarakatan, dan bahkan organisasi keagamaan. Meski demikian, tidak berlebihan untuk menyebut bahwa PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas) Kalimantan Timur adalah salah satu yang paling vocal dan terdepan dalam mendorong diarusutamakannya peran penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan. Dalam hal ini PPDI Kalimantan Timur menganut secara ketat prinsip “tidak kebijakan tentang kami, tanpa melibatkan kami dalam prosesnya”

Di Kalimantan Timur, sejumlah kebijakan tentang disabilitas yang telah diimplementasikan mengalami kegagalan yang fatal (misalnya: pemasangan ram yang terlalu curam, pemasangan guiding blok yang membahayakan jiwa, dll). Kesalahan-kesalahan tersebut ditengarai sebagai akibat dari tidak terlibatnya penyandang disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan-kebijakan itu sendiri. Bagaimanapun juga, sejumlah program pemberdayaan (empowerment) yang menysar kelompok penyandang disabilitas di Kalimantan Timur telah diupayakan secara maksimal oleh pemerintah. Meski masih bermatra charity dan jauh dari prinsip keberdayaan yang ideal bagi penyandang disabilitas, program-program pemerintah yang berbasis rehabilitasi secara umum membuat perbedaan yang berarti dalam kehidupan para penyandang disabilitas di Kalimantan Timur.

### **Daftar Pustaka**

- Collin Barnes dan Geof Mercer, *Disability: Key Concepts*, London: Polity Press, 2003
- Deepa Narayan, *Empowerment and Poverty reduction: A Source Book*, Washington, The World Bank: 2002
- Juliet C. Rothman, *Social Work Practice Across Disability*, New York, Pearson Education: 2003
- Ken Davis “The Disabled People’s Movement: Putting The Power in Empowerment” paper disajikan dalam seminar internasional Shiffeld University pada tahun 1996.
- Kishor Bhanushali, “Changing Face of Disability Movement: From Charity to Empowerment” paper dipresentasikan pada seminar nasional “Revisiting Social Work in The Field of Health –A Journey From Welfare to Empowerment” pada 20-21 Februari 2007, University of Baroda, India.
- Majid Turmusani, *Disabled People And Economic Needs In The Developing World: A Political Perspective From Jordan*, Hampshire, Ashgate: 2003
- Michelle Moore, Sarah Deazley dan June Maezler, *Researching Disability Issues*, Philadelphia, Open University Press, 1989
- Paul T. Jaeger dan Cyntia Ann Bowman, *Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity and Civil Rights*, New York: Praeger, 2005
- Riant Nograho, *Social Policy for Developing Counties*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2012
- Survey Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Departemen Sosial RI, 2008.
- Toward a Common Language for Functioning, Disability and Health, WHO, Geneva: 2002.